

PERAN ORGANISASI PEMBELAJAR DALAM GERAKAN PETANI

Role Of Learning Organization In Peasant Movement

Fani Dwi Iswari¹⁾, Endriatmo Soetarto¹⁾ dan Mohammad Shohibuddin¹⁾

¹⁾Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia

E-mail: iswarifani@gmail.com; endriatmo@apps.ipb.ac.id; m-shohib@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Medalsari community had been enduring the casualties after the access of their arable lands disturbed. The access-losing caused by land deprivation as a result of Perum Perhutani's officers moving the land boundaries. By that, peasants start self-organized and build collective acts to facing the conflict. The peasant's need in collecting the knowledge brings them to involved in learning process that transformed the movement as learning organization. This thesis aimed to analyze structure changing of land occupying that turns into object of conflict and identify learning organization in the peasant's movement. The research using quantitative approach that supported by qualitative data. Snowball method is used as the sampling method and taken by purpose. The result of the research shows that facilitating factors such as open climate of openness and continuous education then learning orientation in the form of skill development have strong relationship with peasant movement dimension.

Keywords: *agrarian movement, collective awareness, organizational learning system*

ABSTRAK

Masyarakat Desa Medalsari mengalami kerugian pasca terganggunya akses terhadap lahan garapan. Hilangnya lahan tersebut disebabkan oleh penyerobotan lahan yang dilakukan oleh oknum Perum Perhutani dengan cara memindahkan tapal batas lahan. Petani mulai mengorganisasikan diri dan membangun aksi kolektif dalam menghadapi sengketa. Kebutuhan petani akan peningkatan wawasan membawa mereka aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang mentransformasikan gerakan petani sebagai organisasi pembelajar. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisa perubahan struktur penguasaan lahan yang menjadi objek sengketa dan mengidentifikasi organisasi pembelajar dalam gerakan petani. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode *snowball* sedangkan pemilihan terhadap informan dilakukan secara sengaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor fasilitas berupa iklim terbuka dan pendidikan berkelanjutan serta orientasi belajar berupa pengembangan keterampilan memiliki hubungan yang kuat dengan dimensi gerakan petani.

Kata kunci: gerakan agraria, kesadaran kolektif, sistem belajar organisasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan modal sumber daya alam. Kekayaan alam Indonesia didukung dengan adanya kelimpahan dan keragaman hayati, iklim tropis, serta hamparan lahan yang luas. Banyak masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, BPS (2013) mencatat rumahtangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumahtangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar) dan rumah tangga bukan petani gurem

(rumahtangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan 0,50 hektar atau lebih). Hasil statistik tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah rumahtangga pengguna lahan di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 25.751.267 rumahtangga, dengan jumlah rumahtangga petani gurem sebanyak 14.248.864 rumahtangga. Sumberdaya yang penting bagi pertanian salah satunya adalah lahan. Namun ketersediaan lahan yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Inilah yang memicu timbulnya konflik pertanahan (Putri 2012).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dirancang untuk mengatur hubungan antara subjek dan objek agraria pada tahun 1960 diharapkan dapat mengatasi permasalahan agraria yang diwariskan oleh masa pemerintahan kolonial. Pada masa sekarang ini UUPA tidak lagi menjadi rujukan utama untuk menyelesaikan permasalahan agraria tertentu, banyak pihak telah menciptakan produk hukum sendiri dalam mengatur sumberdaya. Diferensiasi pada sektor pertanian pangan di antara warga desa di sejumlah tempat diperparah oleh pengambilalihan wilayah produksi dan cadangan produksi desa (termasuk kawasan hutan) untuk berbagai proyek pembangunan dan usaha komersial skala besar. Hal ini mencakup pembangunan dan usaha komersial di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan sebagainya (Shohibuddin 2016). Pemanfaatan lahan dalam pembangunan ekonomi melalui usaha komersial tidak jarang menekan petani sebagai rakyat kecil.

Kasus-kasus sengketa lahan yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa belum terlindunginya hak rakyat atas lahan secara umum dan terhadap petani secara khusus. Adanya kepentingan yang sama terhadap sumber produksi yang sama merupakan sumber konflik bagi masing-masing pihak, baik bagi rakyat kecil atau petani, negara, maupun pemilik modal (Asy'ari 2014). Perbedaan kepentingan dari banyak pihak ini menyebabkan upaya penyelesaian masalah agraria semakin kompleks. Isu-isu yang kerap muncul antara lain seperti *land grabbing* dan tumpang tindih kepemilikan lahan yang berakhir pada sengketa. Peristiwa tersebut melibatkan pihak-pihak seperti pemodal besar maupun pemerintah yang dihadapi oleh petani. Pertentangan antara dua belah pihak atau lebih dalam mencapai dan mempertahankan kepentingan masing-masing dapat menimbulkan konflik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan terdapat 450 kasus konflik agraria yang terjadi pada tahun 2016.

Ketegangan struktural agraria menjadi prakondisi utama munculnya gerakan petani. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan pembangunan yang tidak responsif terhadap kepentingan petani (Hartoyo 2010). Hal tersebut terjadi pada kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan Perhutani di Desa Medalsari, dimana Perhutani melakukan penyerobotan lahan dan menyatakan klaim atas lahan garapan petani. Soetarto dan Cahyono (2014) mengatakan bahwa menilik sejarah pengelolaan hutan di Indonesia terkesan kuat ia masih belum keluar dari watak yang

terwariskan dari model *Domein Verklaring* (1870). Isinya seluruh wilayah dalam teritorial yang tidak ada pembuktian 'hak kepemilikan' legalnya akan diklaim sebagai milik atau dikuasai negara. Fakta yang dapat dilihat di Desa Medalsari dimana seharusnya petani menguasai lahan garapan sementara itu Perhutani menguasai kawasan hutan negara, namun penyerobotan atas lahan garapan petani yang dilakukan oleh oknum Perhutani menimbulkan begitu banyak kerugian yang dialami petani karena terhambatnya akses mereka atas lahan garapan dan adanya tindakan intimidasi.

Gerakan Petani Medalsari terlahir sebagai respon atas sengketa lahan yang menyebabkan kerugian bagi petani. Organisasi pembelajar merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan sebagai upaya penyadaran kritis melalui edukasi. Perlu adanya sistem yang mengatur berbagai jenis peran dan taraf kemampuan yang biasanya dibutuhkan sebagai sistem pendukung pendidikan di masyarakat (Fakih *et al.* 2007). Sistem belajar organisasi dapat menjadi konsep yang membantu masyarakat untuk menjelaskan, memahami dan mengorganisir diri dalam mengelola sumber daya dan isu-isu terkait. Bagi petani Desa Medalsari, sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan guna menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh berubahnya struktur agraria. Oleh karena itu penulis ingin menganalisis bagaimana peran organisasi pembelajar dalam gerakan petani?

PENDEKATAN TEORITIS

Sengketa Lahan

Fauzi (1999) mengatakan meskipun UUPA sudah secara tegas memihak kepada kepentingan rakyat, namun disisi lain jiwa serta semangat kebijakan pertanahan masih bersifat kapitalistis. Kebijakan negara mengenai persoalan tanah masih banyak berpihak kepada pemodal besar. Banyak kasus sengketa lahan berakhir dengan dimenangkan oleh pihak pengusaha besar yang memanfaatkan tanah sebagai sarana mengembangkan usahanya.

Konflik dalam penguasaan atas tanah muncul karena terjadinya perbedaan konsep kepemilikan. Masing-masing pihak yang bersengketa memiliki pandangan dan ideologinya sendiri yang memperkuat keyakinan mereka akan kepemilikan sebidang tanah yang diperebutkan Tjondronegoro (1999). Perebutan atas kekuasaan tanah terjadi karena adanya berbagai

macam kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa. Perampasan lahan masyarakat tidak lepas dari peran negara di dalamnya, Sutedi (2008) menjelaskan bahwa terdapat dua metode dalam perampasan tanah di pedesaan yaitu (1) menggunakan aparat birokrasi lokal untuk mengelabui rakyat dan (2) melakukan kekerasan dengan meminta bantuan tentara seperti penangkapan, pemukulan, pemenjaraan atau intimidasi.

Tumpang tindih klaim kawasan hutan terjadi akibat legislasi dan kebijakan yang tidak terformulasi dengan jelas, pemberian izin yang tidak terkoordinasi, tidak adanya pelayanan pemerintah atas pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal pengguna hutan lainnya. Penelitian Endrawati *et al.* (2013) konflik yang dipicu mengakibatkan penutupan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumberdaya alam yang diperebutkan muncul dan meluas sebagai penghilangan hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil dan politik masyarakat, yang secara langsung berupa hilangnya wilayah hidup, mata pencaharian, harta benda hingga jatuhnya korban jiwa.

Organisasi Pembelajar

Organisasi pembelajar dibutuhkan dalam gerakan petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petani dalam menghadapi isu-isu agraria, hal tersebut sejalan dengan pendapat Scott (1976) yang mengatakan bahwa strategi yang dilakukan petani adalah pengorganisasian petani. Tulisan Marquardt (1996) mengatakan organisasi pembelajar mengarah kepada tingkat penguasaan dan proses pengembangan pengetahuan. Menurut Senge dalam Marquardt (1996) definisi organisasi pembelajar sebagai organisasi yang anggotanya secara terus-menerus memperluas kapasitasnya demi terciptanya hasil yang benar-benar diinginkan bersama. Dalam menghadapi isu-isu agraria petani harus mampu beradaptasi dan melakukan perubahan. Organisasi pembelajar sebagai konsep yang dibutuhkan petani dalam meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas sebagai strategi menghadapi isu-isu agraria.

Sistem Belajar Organisasi

Belajar dapat dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok dengan tujuan tertentu. DiBella A *et al.* (1996) mengatakan sistem belajar organisasi terdiri

atas dua aspek yang pertama adalah faktor-faktor fasilitas, terdiri dari 1) kepemimpinan turun tangan yaitu pemimpin tidak hanya membantu mengembangkan visi sebuah organisasi, namun juga ikut serta dalam kegiatan implementasi visi dalam tersebut; 2) Inisiator pembelajaran yakni usaha belajar organisasi yang sukses membutuhkan lebih dari satu “jawara.” Lebih banyak jumlah “penjaga gerbang” yang membawa (menginduksi) pengetahuan ke dalam sistem dan advokasi yang menyebarkan ide-ide baru; 3) Keterbukaan iklim yaitu kemauan untuk mengambil resiko dan menjelajahi kawasan baru akan lebih sering muncul dalam organisasi yang merangsang iklim keterbukaan. Hal ini termasuk kebebasan mengekspresikan pandangan yang beragam serta dapat memunculkan beragam sudut pandang dalam suatu masalah dan termasuk untuk belajar dari kesalahan; dan 4) pendidikan berkelanjutan yaitu utamanya dalam proses pembelajaran dibangun dari komitmen untuk edukasi seumur hidup di setiap tingkatan organisasi. Kedua, orientasi belajar yang di dalamnya terdapat 1) sumber pengetahuan yaitu cara organisasi mengembangkan pengetahuan baru, 2) mode diseminasi yakni Cara organisasi untuk membuat ruang belajarnya dapat berkembang, 3) fokus pengetahuan pilihan organisasi dalam meningkatkan satu aspek, dan 4) pengembangan keterampilan pilihan organisasi menempatkan perhatiannya pada penambahan kemampuan secara individu atau melalui pembelajaran kelompok.

Gerakan Agraria dan Gerakan Petani

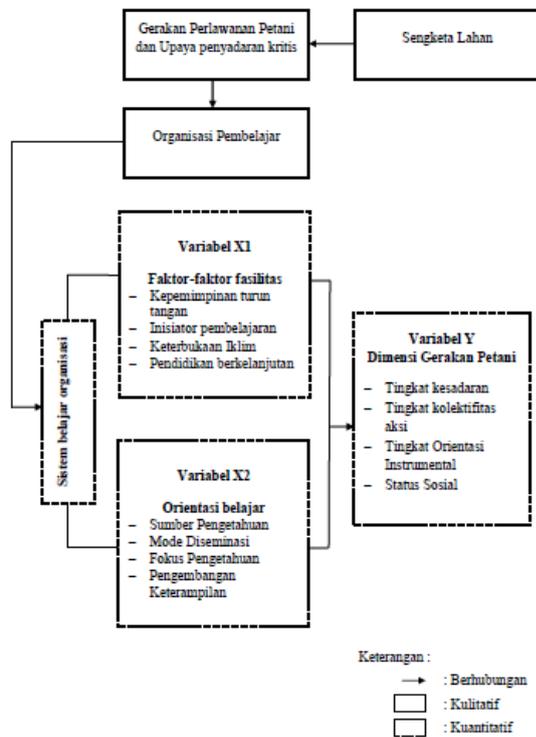
Hartoyo (2010) Gerakan “agraria” adalah suatu bentuk gerakan sosial yang mengusung isu keadilan dan demokrasi agraria. Gerakan agraria tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan petani, tetapi juga bisa dilakukan oleh aktor-aktor lain selain petani yang mengusung agenda perubahan agraria. Gerakan petani bisa disebut sebagai gerakan agraria karena aktor gerakan terdiri atas petani dan non petani, basis massa utamanya adalah petani, isu utama gerakan adalah persoalan agraria, dan agenda utamanya adalah perubahan tatanan agraria.

Menurut Asy'ari (2014) gerakan petani adalah gerakan sosial paling tua yang lahir dari kontradiksi masyarakat pedesaan yang bertumpu pada kondisi agraria atau ketersediaan tanah di seluruh dunia. Ketimpangan agrarialah yang kemudian mendorong lahirnya gerakan massa tani yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak petani sekaligus

menjadi saluran politik bagi petani dalam menghadapi ketimpangan. Asy'ari (2014) juga mengatakan gerakan petani adalah bagian dari aksi perlawanan masyarakat agraria atas ketimpangan yang mereka alami. Kecerung dukungan terhadap gerakan petani di tingkatan lokal masih cenderung terbatas yaitu hanya berupa hubungan organisasional yang dikuatkan oleh garis politik yang sama.

Kerangka Pemikiran

Sengketa lahan yang terjadi di Desa Medalsari mendorong terbentuknya gerakan perlawanan petani. Gerakan petani tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan keadilan dan hak mereka atas lahan. Petani sebenarnya adalah pengamat yang sangat teliti mereka selalu melakukan evaluasi dari perkembangan yang dilakukan dari hal itulah petani belajar dan memperkaya ilmu pengetahuannya (Winarto dan Darmowiyoto 1999). Salah satu usaha yang dilakukan dalam menghadapi sengketa dengan Perhutani adalah penyadaran kritis bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam sengketa lahan. Upaya penyadaran kritis dilakukan dengan tujuan mengembangkan kapasitas dari komunitas lokal baik dari segi pendidikan maupun keterampilan. *Learning organization* atau organisasi pembelajar merupakan sebuah konsep yang dapat menjelaskan proses diseminasi pengetahuan petani.



Gambar 1 Kerangka pemikiran

Fremerey (2002) mengatakan konsep organisasi pembelajar melibatkan aktor sosial dan pengetahuan lokal yang dipadukan untuk mendalami wawasan dan proses belajar di masyarakat. Wawasan yang diperoleh dapat berguna dalam memperoleh identifikasi lokal yang relevan. Sistem belajar organisasi terdiri atas dua aspek yang pertama adalah faktor-faktor fasilitas, terdiri dari kepemimpinan yang terlibat, inisiator pembelajaran keterbukaan iklim, pendidikan berkelanjutan. kedua, orientasi belajar yang di dalamnya terdapat sumber pengetahuan, mode diseminasi, fokus pengetahuan, dan pengembangan keterampilan. proses belajar yang dijelaskan dalam konsep tersebut dihubungkan dengan pemenuhan dimensi gerakan petani yang diukur dari tingkat kesadaran, tingkat kolektifitas aksi, tingkat orientasi instrumental, dan status sosial.

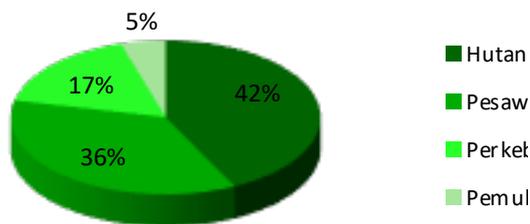
METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dan penelitian penjelasan (*explanatory research*) mengacu pada Tukiran dan Effendi (2012) dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial atau fakta suatu peristiwa di daerah tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan didukung data kualitatif dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner dan panduan wawancara mendalam. Penelitian dilaksanakan di Desa Medalsari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Lokasi dipilih dengan cara *purposive* dengan alasan Desa Medalsari merupakan desa yang mengalami sengketa lahan dengan Perum Perhutani. Populasi penelitian merupakan petani di Desa Medalsari yang terlibat sengketa dengan Perum Perhutani. Responden atau unit analisis dalam penelitian ini adalah individu petani yang ikut terlibat dalam gerakan petani. Penetapan informan dalam wawancara ditentukan melalui metode *snowball*. Data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel 2010 dan SPSS 20.0 for Windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Karakter Sosial-Ekonomi Desa Medalsari

Desa Medalsari secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Pangkalan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Karawang. Berdasarkan letak geografis Desa Medalsari berada pada ketinggian sekitar 850 meter di atas permukaan laut. Jarak tempuh Desa Medalsari dari ibu kota kecamatan sekitar 25 km, sedangkan dari ibu kota kabupaten sekitar 107 km. Lokasi desa terletak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Karawang dan sebagian besar dari wilayahnya adalah hutan. Luas lahan Desa Medalsari menurut penggunaan adalah 1.158,02 hektar yang terbagi atas beberapa bagian. Pemukiman warga menggunakan lahan sekitar 5%, sedangkan luas wilayah yang digunakan untuk pesawahan sekitar 36%, perkebunan 17%, hutan 42%. Gambaran rinci dari luas penggunaan lahan di Desa Medalsari dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber data demografi Desa Medalsari 2016

Gambar 2 Diagram penggunaan lahan di Desa Medalsari

Hutan merupakan bagian terluas dari Desa Medalsari, secara keseluruhan luas total hutan yang tercatat dalam data desa adalah 453,02 hektar. Banyak petani lokal menggantungkan hidupnya dari hasil berkebun di wilayah perbukitan hutan. Lahan hutan terbagi atas hutan asli (33%), hutan produksi (34%), hutan produksi tetap (18%), hutan produksi terbatas (15%). Kesejahteraan masyarakat Desa Medalsari dapat dianalisis melalui kondisi perekonomiannya. Masyarakat Desa Medalsari memiliki tingkat taraf hidup yang rendah dan termasuk dalam golongan yang menengah ke bawah. Banyak dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan hidup dengan kondisi pas-pasan. Rumah yang menjadi tempat masyarakat tinggal kebanyakan merupakan rumah panggung berukuran relatif kecil yang bermaterialkan bilik bambu.

Sumber penghidupan atau mata pencaharian masyarakat di Desa Medalsari cukup beragam. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dalam data menyebutkan sebanyak 47.9%, ragam komoditas yang banyak ditanam petani adalah padi, kopi, cengkeh, durian, dan rambutan. Setelah itu buruh tani menempati posisi kedua terbesar setelah petani, yakni 31.9% dari total penduduk usia produktif. Sementara itu penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta tercatat sebesar 9.3%, setelah itu sebagian kecil penduduk bermata pencaharian sebagai peternak sebesar 3.4%, pengrajin 2.8%, pedagang 2.5%, dan buruh migran sebanyak 1,42%. Sebagian kecil penduduk Desa Medalsari juga bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tercatat sebesar 0.67%, TNI dan Polri masing-masing sebesar 0.32% serta pensiunan PNS sebesar 0.33%. Mayoritas penduduk Desa Medalsari menggantungkan hidupnya dibidang pertanian, hal tersebut dikarenakan kondisi desa yang cocok untuk bertani.

Jumlah penduduk Desa Medalsari berjumlah sebanyak 3.734 jiwa yang terdiri dari 1.826 laki-laki dan 1.908 perempuan. Sebagian besar masyarakatnya adalah Suku Sunda yakni sebanyak 3.719 jiwa. Suku pendatang yang berasal dari Pulau Jawa yang paling banyak menempati Desa Medalsari adalah 13 jiwa yakni suku Jawa. Penduduk Desa Medalsari seluruhnya memeluk agama Islam. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Desa Medalsari tergolong memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut dikarenakan hanya sekitar 2.5% dari penduduk menyelesaikan pendidikan hingga memenuhi program pendidikan wajib sembilan tahun yang digerakkan pemerintah.

Sengketa Lahan dan Dinamika Sosial di Desa Medalsari

Kondisi lahan sengketa seluas kurang lebih 800 hektar di Desa Medalsari, terletak di dataran tinggi yang berbukit-bukit dan berbatasan dengan hutan. Akses yang cukup sulit menyebabkan lahan terbengkalai dan menyatu dengan hutan selama masa penjajahan. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membebaskan rakyat dari belenggu penjajah. Adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 berlaku untuk mengatur pembatasan penguasaan lahan, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas lahan, pengakuan hukum adat.

Lahan yang semula dirampas penjajah dikelola oleh warga sebagai lahan pertanian seperti pesawahan dan perkebunan. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 12 Nomor 16 Tahun 1958 menyatakan lahan tersebut merupakan milik negara, selain itu undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 menyatakan lahan tersebut termasuk ke dalam lahan usaha yang artinya adalah lahan yang di atasnya sudah ditempati oleh penduduk dan berhak diberikan kepada masyarakat yang mendiami lahan tersebut.

Masyarakat ikut mengajukan hak milik melalui redistribusi dengan diturunkannya SK Menteri Agraria Nomor 30/Ka/62 tanggal 8 November 1962 sebagai obyek *land reform*. Mengacu pada berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, terbentuklah Panitia *land reform* Daerah Tingkat II Karawang dengan SK Nomor : 29/PLD/VIII/52 pada 17 Juni 1965 dan SK Kinag Jabar Nomor 228/C/VIII/52/1965 memberikan hak milik atas lahan kepada rakyat. Perjuangan dan penantian petani melewati proses yang cukup lama, pada tahun 1967 dilakukan pengukuran untuk menentukan tapal batas hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani dan tanah desa, selanjutnya pada tahun 1975 petani memperoleh girik atas lahan desa. Tidak lama setelah petani memperoleh girik yakni pada tahun 1976 Perhutani melalui pemerintah desa dan KRPH Cigudeg menarik semua girik milik petani dengan alasan untuk dipinjam.

Penebangan pohon-pohon milik petani yang dilakukan oknum Perhutani membuat petani merasa dirugikan, tanaman yang menjadi sumber penghidupan keluarga mereka dimusnahkan tanpa ganti rugi. Menanggapi sikap Perhutani yang sewenang-wenang, pada tanggal 25 Mei 1981 sebanyak 165 orang petani menyatakan sikap dengan membuat surat pernyataan untuk meminta kembali surat tanah atau girik yang telah dipinjam perhutani.

Perjuangan petani yang dimulai pada tahun 1986 tidak pernah berhenti dan diteruskan secara turun temurun oleh anak dan cucunya, mereka masih menjalankan pekerjaan sebagai petani maupun buruh tani dalam mengolah lahan sengketa tersebut. Petani Medalsari mulai belajar berorganisasi pada tahun 2005 dengan tujuan khusus untuk belajar dan mengembangkam pengetahuan mereka dalam mencari cara untuk mendapatkan keadilan, selain itu petani juga belajar mengenai potensi mereka dalam berusaha tani.

Organisasi Pembelajar dan Gerakan Petani

Dimensi gerakan petani dapat terpenuhi dilihat dari empat dimensi seperti tingkat kesadaran, tingkat kolektifitas aksi, tingkat orientasi intrumental, dan status rendah yang ada dalam setiap upaya mencapai tujuan. Terdapat proses pembelajaran dalam gerakan petani yakni dengan tujuan agar anggotanya lebih berdaya dan dapat mengembangkan potensi yang terdapat disekitarnya.

Akses petani terhadap lahan yang terganggu karena adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di Medalsari mendorong petani untuk mengorganisir dirinya dan merapatkan barisan menghadapi pihak lawan. Gerakan petani dapat dilihat lebih dalam melalui dimensinya. Dimensi gerakan petani terdiri atas keempat faktor yang ada di dalam gerakan, dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah tingkat kesadaran, tingkat kolektifitas aksi, tingkat orientasi intrumental, dan status rendah. Berikut jumlah dan presentase responden petani Medalsari berdasarkan dimensi gerakan petani.

Tabel 1 Jumlah dan persentase responden berdasarkan dimensi gerakan petani

Tingkatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	2	6.7
Sedang	12	40.0
Tinggi	16	53.3
Total	30	100.0

Tabel 1 menunjukkan bahwa dimensi gerakan petani dalam menghadapi perusahaan berada pada tingkat partisipasi Tinggi yaitu sebanyak 16 orang atau 53.3 %. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya petani yang berjuang dalam mengambil haknya kembali dengan cara terlibat dalam gerakan. Masyarakat Desa Medalsari sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Petani mengolah lahan garapan yang kini telah menjadi lahan sengketa, mereka masih tetap bertahan mengelola tanaman di lahan tersebut demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Faktor-faktor Fasilitas

Sosok pemimpin memiliki peran yang penting dalam berjalannya sebuah organisasi, pemimpin memegang andil dalam mengambil langkah penting yang berarti untuk berjalannya organisasi. Idealnya pemimpin

senantiasa memiliki ikatan dengan anggotanya dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan penting yang dijalankan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Responden merupakan petani Medalsari yang aktif dalam organisasi. Tingkat kepemimpinan turun tangan berdasarkan penilaian responden dalam penelitian ini digolongkan seperti berikut.

Tabel 2 Jumlah dan presentase responden berdasarkan kepemimpinan turun tangan

Kepemimpinan turun tangan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	2	6.7
Sedang	13	43.4
Tinggi	15	50
Total	30	100

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat responden yang menilai tingkat kategori kepemimpinan turun tangan dalam gerakan. Responden yang menilai tingkat keterlibatan pemimpin mereka dalam kategori tinggi adalah 15 orang atau 50% dari total responden.

Petani juga dapat mengemukakan pendapat mengenai usulan yang ada sebagai respon atas ide-ide dalam proses pembelajaran. Proses belajar yang efektif menuntut pesertanya untuk aktif dan terbuka dalam mengemukakan ide yang dapat mendorong inisiatif petani sebagai aktor lokal. Berdasarkan data penelitian diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 3 Jumlah dan presentase responden berdasarkan inisiator pembelajaran

Inisiator pembelajaran	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	17	56.7
Sedang	8	26.7
Tinggi	5	16.7
Total	30	100.0

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden berada pada tingkat kategori rendah. Sebanyak 17 orang atau 56.7% menilai mereka tidak berpartisipasi aktif sebagai inisiator dalam berjalannya proses belajar. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya petani yang kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat mereka.

Sebuah proses belajar akan berjalan efektif apabila suasana yang dibangun dalam kegiatan belajar berada pada iklim yang terbuka. Artinya materi yang menjadi bahan diskusi petani dijabarkan secara transparan, tujuan dan proses usulan agenda harus jelas

kegunaannya bagi gerakan petani dan dapat dipahami oleh peserta pembelajaran mengenai apa yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan petani. petani juga memiliki kebebasan untuk menolak ide apabila gagasan yang diusulkan tidak sesuai dengan visi dan misi gerakan petani.

Tabel 4 Jumlah dan presentase responden berdasarkan keterbukaan iklim

Keterbukaan Iklim	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	6	20.0
Sedang	8	26.7
Tinggi	16	53.3
Total	30	100

Data pada Tabel 14 menunjukkan bahwa keterbukaan iklim yang dinilai oleh responden penelitian berada pada tingkat tinggi. Sebanyak 16 orang atau 53,3% dari total responden berada pada kategori keterbukaan iklim tinggi. Kegiatan pembelajaran petani yang dijalankan melalui kegiatan rutin riungan di Medalsari memiliki iklim yang terbuka. Maksudnya petani memiliki kebebasan dan hak untuk berpendapat.

Umumnya proses pembelajaran dibangun dari komitmen untuk edukasi seumur hidup di setiap tingkatan organisasi. Kehadiran pelatihan tradisional dan kegiatan pengembangan tidaklah cukup dibutuhkan dorongan internal dalam menjaga komitmen belajar petani. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 5 Jumlah dan presentase responden berdasarkan pendidikan berkelanjutan

	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	13	43.3
Sedang	9	30.0
Tinggi	8	26.7
Total	30	100

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat pendidikan berkelanjutan yang rendah. Maksud dari pendidikan berkelanjutan yang rendah adalah bahwa komitmen petani sebagai peserta pendidikan masih memiliki banyak hambatan untuk berkembang secara kontinyu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam mayoritas petani memilih untuk mengutamakan kegiatan mencari nafkah dibandingkan untuk belajar. Hal tersebut karena banyak dari petani yang datang dari keluarga menengah ke bawah, sehingga petani lebih memilih

untuk melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya.

Orientasi Belajar

Cara yang digunakan oleh organisasi dalam mengembangkan pengetahuan baru dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Pengetahuan dikembangkan secara internal apabila sumbernya berasal dari anggota organisasi, adapun dengan cara lainnya yaitu mencari inspirasi dari ide yang terkembang dari luar organisasi yang disebut sebagai sumber pengetahuan eksternal. Keduanya sama pentingnya selama bisa menjadi fasilitas untuk berkembangnya individu dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan data sebagai berikut.

Tabel 6 Jumlah dan presentase responden berdasarkan sumber pengetahuan

Sumber Pengetahuan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	1	3.3
Sedang	6	20.0
Tinggi	23	76.7
Total	30	100

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa penilaian responden mengenai sumber pengetahuan berada pada kategori tinggi. Sebanyak 76.7% dari total responden setuju bahwa sumber pengetahuan dari kegiatan belajar dapat berasal dari dalam gerakan petani Medalsari maupun orang luar seperti pemateri yang dihadirkan dari LSM maupun dari lembaga seperti BPN. Petani berpendapat bahwa siapapun yang memberikan materi selama itu demi kemajuan bagi petani dan dapat membantu mencapai tujuan maka petani akan menerima pemateri manapun dengan terbuka.

Organisasi dapat mencoba untuk membuat ruang belajarnya dapat berkembang dengan cara informal maupun formal seperti kegiatan pendidikan lainnya. Berikut data yang diperoleh dari responden.

Tabel 7 Jumlah dan presentase responden berdasarkan mode diseminasi

Mode Diseminasi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	8	26.7
Sedang	18	60.0
Tinggi	4	13.3
Total	30	100

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden dari penelitian ini menilai mode diseminasi berada pada tingkat sedang sebanyak 18 orang atau 60% , responden pada kategori ini merupakan responden yang memiliki karakter terbuka dan aktif dalam kegiatan belajar yang diselenggarakan baik dengan cara formal maupun informal.

Gerakan petani Medalsari memiliki fokus yang tertuju pada hasil. Sengketa lahan yang dihadapi membuat petani lebih memilih untuk menempuh cara yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan data wawancara responden, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 8 Jumlah dan presentase responden berdasarkan fokus pengetahuan

Fokus Pengetahuan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	8	26.7
Sedang	15	50.0
Tinggi	7	23.3
Total	30	100.0

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa mayoritas fokus pengetahuan responden penelitian berada pada tingkat sedang .Sebanyak 15 orang atau 50% dari total responden berada pada tingkat fokus pengetahuan pada kategori sedang.

Petani harus terampil beradaptasi menghadapi situasi yang cukup kompleks ditambah lagi petani harus tetap melakukan kegiatan berkebun sebagai mata pencaharian utamanya untuk itu penting bagi petani untuk memperluas kapasitasnya sebagai dorongan menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Berdasarkan hasil wawancara responden diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 9 Jumlah dan presentase responden berdasarkan pengembangan keterampilan

Pengembangan Keterampilan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Rendah	1	3.3
Sedang	8	26.7
Tinggi	21	70.0
Total	30	100.0

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yakni sebanyak 21 orang atau 70% dari total responden menilai pengembangan keterampilan berada pada tingkat kategori yang tinggi. Petani sepakat bahwa dalam

menghadapi situasi sengketa lahan mereka harus tetap melakukan pengembangan terhadap kegiatan usahatani yang dijalankan. Tindakan oknum Perhutani yang sering menghambat akses petani terhadap lahan bukanlah halangan bagi petani untuk terus melakukan pengembangan usaha mereka. Petani aktif mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai tata cara tanam yang efisien, belum lama ini petani Medalsari juga melakukan produksi kopi instan dalam kemasan dan dipasarkan oleh petani sendiri. Sedikit demi sedikit usahatani yang dilakukan mulai berkembang kini petani bukan hanya menanam dan menghasilkan kopi mentah, petani mulai belajar untuk memproduksi hasil olahan pertaniannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bentuk perampasan lahan dialami oleh masyarakat Desa Medalsari berawal dari dipinjamnya girik milik petani oleh Perhutani melalui pemerintahan setempat pada tahun 1976. Kondisi tersebut mulai merugikan petani ketika pihak Perhutani menebangi pohon milik petani tanpa memberikan ganti rugi. Penyerobotan lahan petani dilakukan dengan cara dipindahkannya tapal batas hutan dan tanah garapan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga tapal batas tersebut kini berada di dalam wilayah kebun milik petani. Petani mulai bergerak dalam menanggapi sikap Perhutani yang merugikan mereka. Pada tahun 1981 petani didampingi pemerintah Kecamatan Pangkalan membuat surat pernyataan meminta kembali girik yang dipinjam. Kekuatan politik yang dimiliki oleh pihak lawan membuat surat pernyataan yang dibuat petani tidak membuahkan hasil.

Gerakan petani dapat dilihat lebih dalam melalui dimensinya. Dimensi gerakan petani di Medalsari dapat ditinjau melalui empat faktor yang ada di dalam gerakan, dimensi-dimensi tersebut antara lain adalah tingkat kesadaran, tingkat kolektifitas aksi, tingkat orientasi instrumental, dan status rendah. Dimensi gerakan petani Desa Medalsari berada pada tingkat kategori yang tinggi, kesamaan nasib yang dirasakan petani mendorong rasa persatuan yang tumbuh di kalangan petani sehingga gerakan petani bangkit kembali melalui pengorganisasian petani sebagai gerakan. Proses bangkitnya gerakan petani melibatkan aksi-aksi kolektif dari semua pihak yang terlibat, bantuan dari luar seperti organisasi maupun

LSM juga ikut menyokong pergerakan dan perkembangan gerakan petani. Kebutuhan petani untuk memperluas kapasitasnya dapat dipenuhi dengan pendidikan. Organisasi pembelajar dapat digunakan sebagai sudut pandang untuk melihat bagaimana proses perkembangan gerakan petani dalam mencapai tujuan kolektif melalui sistem belajar organisasi pada gerakan petani.

Kegiatan pembelajaran yang dijalankan melalui kegiatan rutin riungan di Medalsari memiliki iklim yang terbuka. Kegiatan rutin dilakukan dengan di damping oleh pihak Sepetak. Maksudnya petani memiliki kebebasan dan hak untuk berpendapat. Petani dapat mengekspresikan tanggapan mereka terhadap sebuah ide tanpa secara bebas. Pengembangan keterampilan perlu dilakukan oleh petani baik dalam sumber daya manusia maupun sumberdaya alam, hal tersebut berguna untuk memperluas kapasitas dan memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal yang ada. Petani Medalsari telah memaksimalkan usahatani secara berkelompok melalui proses pembelajaran. Petani mulai mengembangkan usahatani pada komoditas kopi dimana mereka mulai memproduksi olahan kopi lokal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan masukan atau saran. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Karawang, serta instansi-instansi terkait lainnya untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan sampai tuntas kasus sengketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat di Desa Medalsari. Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, perusahaan terkait penyelesaian kasus sengketa lahan Desa Medalsari.
2. Harus ada pihak ketiga yang netral sebagai penengah dan tidak memihak siapapun untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian masalah ini.
3. Perlu adanya kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status lahan yang menjadi sengketa. Sertifikat hak milik yang dituntut masyarakat melalui agenda IP4T harus segera dikaji agar masyarakat segera mendapat kepastian.
4. Serikat Petani Karawang (Sepetak) agar terus mengawal dan mendampingi usaha advokasi

yang ditempuh sampai petani mendapatkan keadilan.

5. Sebaiknya pihak Perum Perhutani tidak melakukan perusakan terhadap tanaman yang ditanam petani sebelum adanya kejelasan mengenai lahan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari. 2014. Gerakan petani transnasional di Indonesia Afiliasi aliansi gerakan reforma agrarian dan *peasant coalition* dalam kampanye global anti perampasan tanah di Indonesia. [tesis]. Yogyakarta (ID): Universitas Gajah Mada. [Internet] [Diunduh 20 Desember 2016]. Terdapat pada: http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=75333&obyek_id=4
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Sensus pertanian. [Internet]. [Diunduh pada 15 Maret 2017]. Tersedia pada: <https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php>
- Dibella A, Nevis E, Gould J. 1996. *Understanding Organizational Learning Capability*. *Journal of Management Studies* 33: 361–379. doi:10.1111/j.1467-6486.1996.tb00806.x
- Endrawati N, Junaedi A, Suyadi Y. 2013. Konflik tanah masyarakat dengan kehutanan sebagai refleksi sistem ganda kewenangan atas penguasaan tanah (studi kasus redistribusi tanah obyektif landreform di desa ngerdani kecamatan dongko kabupaten trenggalek). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.02 : 55-69. [Internet] [Diunduh 20 November 2016]. Terdapat pada : http://pascauniska-kediri.ac.id/filesJurnal/Jurnal%20mizan%20Desember%202013_5.pdf
- Fakih M, Raharjo T, Topatimasang R. 2007. *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta (ID): INSISTPress.
- Fauzi N. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta(ID): Pustaka Pelajar Offset.
- Hartoyo. 2010. Involusi gerakan agraria dan nasib petani: studi tentang dinamika gerakan petani di Provinsi Lampung. [disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [KPA] Konsorsium Pembaruan Agraria. 2016. Laporan akhir tahun. Jakarta (ID): Konsorsium Pembaruan Agraria
- Marquardt M. 1996. *Building the learning organization*. California (US) : Davies-Black Publishing. [Internet]. Tersedia pada : [http://ebook.umaha.ac.id/E-BOOK%20ABOUT%20ORGANIZATION,%20MANAGEMENT%20&%20LEADERSHIP/ORGANIZATION%20_%20LEARNING%20ORGANIZATION/BUILDING%20THE%20LEARNING%20ORGANIZATION%20\[Michael%20J.%20Marquardt\].pdf](http://ebook.umaha.ac.id/E-BOOK%20ABOUT%20ORGANIZATION,%20MANAGEMENT%20&%20LEADERSHIP/ORGANIZATION%20_%20LEARNING%20ORGANIZATION/BUILDING%20THE%20LEARNING%20ORGANIZATION%20[Michael%20J.%20Marquardt].pdf)
- Putri R. 2012. Gerakan sosial politik omah tani di kabupaten batang. *Jurnal Politik Muda*. 1: 23-34. [Internet]. [Diunduh 20 Oktober 2016]. Tersedia pada <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/23-34%20riska%20yunike.pdf>
- Scott JC. 1976. *Moral Ekonomi Petani*. Basari H, penerjemah. Jakarta (ID): LP3ES. Terjemahan dari: *The Moral Economy of The Peasant*.
- Shohibuddin M. 2016. Peluang dan tantangan undang-undang desa dalam upaya demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa: perspektif agraria kritis. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. 21(1): 1-33. e-ISSN: 2460-8165
- Soetarto E, Cahyono E. 2014. Reforma agraria kehutanan: pemulihan hak dan persemaian peradaban masyarakat di kawasan hutan. Di dalam: Hakim I, Wibowo L, editor. *Hutan untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. Yogyakarta (ID): PT LKiS Printing Cemerlang. hlm 3-19
- Sutedi A. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta (ID): Sinar Grafika.
- Tjondronegoro SMP. 1999. *Sosiologi Agraria Kumpulan Tulisan Terpilih*. Bandung (ID): Yayasan AKATIGA.
- Tukiran, Effendi S. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Edisi revisi. Jakarta (ID): LP3ES.